

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
(STUDI KASUS PADA BAWASLU KOTA BATAM)**

SKRIPSI



**Oleh:
Gunawan
160710040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
(STUDI KASUS PADA BAWASLU KOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Gunawan
160710040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : **Gunawan**
NPM : **160710040**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Humaniora**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA BAWASLU KOTA BATAM)

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah akademik ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah akademik ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah akademik ini digugurkan dan dicabut yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 23 Juli 2021



Gunawan
160710040

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
(STUDI KASUS PADA BAWASLU KOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

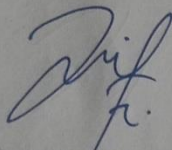
Oleh

Gunawan

160710040

**Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawa ini**

Batam, 24 Juli 2021



**Zulkifli, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Dalam melaksanakan pemilihan umum adanya upaya lembaga terkait dalam melakukan pengawasan terhadap mereka yang berkepentingan. Sifat partisipasi peserta pemilu bertujuan membentuk pemilihan adil. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dan seperti apa penguatan tugas dan kewenangan. Kajian Kerangka teori yaitu kedaulatan rakyat dan kewenangan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris/penelitian lapangan dengan studi wawancara dengan Bawaslu Kota Batam. Dilihat dari peran Bawaslu Kota Batam dalam menjalankan tugas dan kewenangannya membutuhkan tindakan tegas untuk menindak para elit politik yang mempunyai dana besar dalam bermain politik. Tindak yang dilakukan berupa aturan hukum jelas dan sanksi tegas seperti pemberian sanksi pidana maksimal kurungan atau penjara serta denda yang lebih besar. Sehingga mereka yang bermain curang atau para calon legislatif yang memainkan peran money politik menjadi lebih takut. Selain itu, adanya dukungan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Bawaslu Batam yang profesional dibidangnya. Kemudian warga masyarakat harus pintar dan bijak dalam memilih kadernya/wakilnya yang mau duduk dibangku legislatif. Analisa data dapat yaitu analisis kualitatif, kemudian difokuskan, diabstraksikan, disisikan data tersebut secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan, sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang diuraikan dalam pembahasan untuk kemudian disimpulkan.

Kata kunci: penegakan hukum, politik uang, pemilu

ABSTRACT

In general elections, the competent authorities try to control those who have an interest. The nature of voter turnout is geared towards fair elections. The study seeks to find out what Batam City Bawaslu's law enforcement election offenses are and what the strengthening of duties and powers is. A study of the theoretical system, namely human sovereignty and power. The author's research method used is empirical legal research / field research with interview study with Batam City Bawaslu. Judging from the role of Bawaslu in the city of Batam in carrying out its duties and power, decisive action is needed to take action against the political elite, which has many resources to play politics. Actions take the form of clear legal rules and severe sanctions, such as maximum criminal sanctions for arrest or imprisonment and higher fines. Therefore, those who cheat or are candidates for the role of monetary policy legislators are more afraid. In addition, it is supported by human resources, in this case Batam Bawaslu staff who are professionals in their field. Community members need to be smart and wise to choose their staff / representatives who want to sit in the legislature. Data analysis can be a qualitative analysis, then it is focused, summarized, and the data is systematically and rationally populated to provide answers to the problems so that a solution to the problem described in the discussion can be found for later conclusions.

Keywords: *law enforcement, money politics, elections*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI KASUS PADA BAWASLU KOTA BATAM)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program (S1) pada Program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

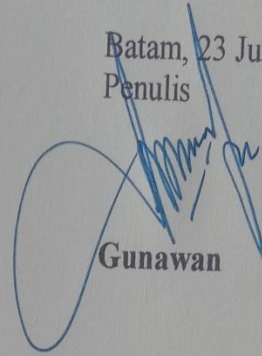
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si, selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Padrisan Jamba, S.H., M.H, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Zulkifli, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
5. Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku Ketua Dosen Pengguji Skripsi;
6. Zuhdi Arman, S.H., M.H, selaku Dosen Pengguji Skripsi;
7. Lenny Husna, S.H., M.H;
8. Irene Svinarky, S.H., M.Kn;
9. Dosen dan Staf Universitas Putera Batam;
10. Orang Tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan penuh kepada Penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Ilmu Hukum;
11. Istri tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat serta bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini;
12. Rekan-rekan seperjuangan semua atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis; dan
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong mahasiswa untuk

penelitian selanjutnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 23 Juli 2021
Penulis



Gunawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	17
1.3. Batasan Masalah	17
1.4. Rumusan Masalah	18
1.5. Tujuan Penelitian	18
1.6. Manfaat Penelitian	18
1.6.1. Manfaat Teoritis	18
1.6.2. Manfaat bagi para praktisi	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teoritis	20
2.1.1. Kedaulatan Rakyat	20
2.1.2. Teori Kewenangan	23
2.2. Kerangka Yuridis	24
2.2.1. Sistem Penegakan Hukum Pemilu	25
2.2.2. Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu	26
2.2.3. Sanksi Administratif Pemilu	28
2.2.4. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu	29
2.2.5. Batasan Waktu Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana	30
2.2.6. Tugas dan Wewenang Pihak yang terlibat dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu	31
2.3. Penelitian Terdahulu	36
2.4. Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Penelitian Hukum Empiris	41
3.2. Metode Pengumpulan Data	42
3.2.1. Data Primer	42
3.2.2. Data Sekunder	42
3.2.3. Alat Pengumpulan Data	43
3.3. Pendekatan dalam Penelitian	43

3.4. Lokasi Penelitian.....	43
3.5. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	45
4.1.1. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Batam	45
4.1.2. Penguatan Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Menegakan Hukum Pemilu	51
4.2. Pembahasan	56
4.2.1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pulitik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Batam	56
4.2.2. Penguatan Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Menegakan Hukum Pemilu	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	83
5.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pendukung Penelitia	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara	

